NI Working Paper Series No. 01

Relasi Muslim-Kristen di Pulau Ambon: Menegosiasikan Identitas Keagamaan, Otoritas Kebudayaan dan Modernitas di Leihitu

Steve Gerardo Christoffel Gaspersz

Dosen pada Fakultas Teologi dan Program Pascasarjana Teologi, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon. Ia memperoleh doktor di bidang *Inter-Religious Studies* dari Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS), sebuah konsorsium dari tiga universitas di Yogyakarta (UGM, UKDW, dan UIN Sunan Kalijaga). Penulis buku *Iman Tidak Pernah Amin: Menjadi Kristen dan Menjadi Indonesia; Umat Pilihan Allah: Suatu Telaah Teologis-Etis Perjanjian Lama mengenai Ulangan 7:1-11;* dan *Batu Karang Yang Teguh: Eklesiologi dan Teologi Publik Timur Indonesia*.
Korespondensi penulis: kabaressi@gmail.com

JANUARI 2021

Nusantara Institute on Culture & Religion
Website: https://www.nusantarainstitute.com/
Email: admin@nusantarainstitute.com

Nusantara Institute Working Paper Series diterbitkan berkala secara elektronik oleh Nusantara Institute, dengan dukungan dari Bank Central Asia. Tujuan publikasi Working Paper ini adalah untuk menstimulasi diskusi, riset, dan studi tentang isu-isu yang berkaitan dengan tradisi, budaya, agama, kepercayaan, serta kerajaan lokal di Indonesia yang menjadi *platform* dan fokus utama Nusantara Institute. Pandangan yang diekspresikan dalam publikasi ini sepenuhnya milik penulis, bukan pandangan resmi Nusantara Institute. Kredit atas pengutipan Working Paper harus diberikan pada penulis dan Nusantara Institute. Jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai publikasi ini, silakan kirim email ke: admin@nusantarainstitute.com.

Dewan Redaksi NI Working Paper Series
Sumanto Al Qurtuby (King Fahd University of Petroleum & Minerals)
Peter Suwarno (Arizona State University)
Al Makin (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)
Fachrizal Halim (University of Sascatchewan)
Ahmad Najib Burhani (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Dewan Eksekutif Nusantara Institute
Sumanto Al Qurtuby (Direktur)
Izak Y.M. Lattu
Tedi Kholiludin
Setiadi Umar
Eliza Prabawa
Ni Luh Djelantik

Dewan Penasehat Nusantara Institute
Y.W. Junardy (Ketua)
Ahmad Syafii Maarif
Robert W. Hefner
Siti Musdah Mulia
John A. Titaley
Sudhamek AWS
Ida Rsi Wisesanatha
Christine Hakim
Mudjahirin Thohir
Bambang Noorsena
KGPH Dipokusumo

Nusantara Institute (NI) adalah lembaga semi-otonom yang didirikan oleh Yayasan Nusantara Kita dengan Nomor Akta Notaris: AHU-00812.AH.02.01 dan Nomor Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM: AHU-0010191.AH.01.04. Institusi ini fokus di bidang studi, kajian, riset ilmiah, publikasi, *scholarship*, *fellowship*, dan pengembangan akademik tentang ke-Nusantara-an. Ada tiga tema utama yang menjadi fokus riset Nusantara Institute, yaitu (1) agama dan kepercayaan Nusantara, (2) tradisi dan kebudayaan Nusantara, dan (3) kerajaan-kerajaan Nusantara. Ketiga tema sentral ini akan terus diteliti secara akademik-ilmiah dengan melibatkan jejaring ilmuwan, sarjana, akademisi, dan peneliti, baik dari Indonesia maupun mancanegara, yang ahli atau memiliki spesialisasi di tema-tema tersebut. Temuan atau hasil-hasil riset nanti diharapkan bisa turut memberi kontribusi penting bagi pemerintah (dalam bentuk pembangunan kebijakan publik), komunitas akademik (dalam bentuk pembangunan teori maupun pengembangan khazanah keilmuan dan intelektual), dan masyarakat luas (dalam bentuk pembangunan kesadaran), tentang hal-ihwal yang berkaitan dengan tradisi, budaya, agama, kepercayaan, dan kerajaan-kerajaan di Nusantara.

Relasi Muslim-Kristen di Pulau Ambon: Menegosiasikan Identitas Keagamaan, Otoritas Kebudayaan dan Modernitas di Leihitu

Abstrak

Studi ini adalah upaya untuk memahami dinamika agama dan budaya dalam komunitas-komunitas lokal di Pulau Ambon. Dengan menggunakan kerangka kerja antropologi politik, analisis difokuskan pada tiga komunitas lokal: Rumahtiga (Kristen), Wakal dan Hitumesing (Muslim). Tujuannya untuk menemukan "modal budaya" ketiga komunitas tersebut dalam mengelola kehidupan sosial yang harmoni di tengah masyarakat yang plural serta dalam menjaga keseimbangan hubungan antarkelompok yang beraneka ragam melalui negosiasi identitas dalam konteks historis, politis, keagamaan dan kebudayaan Maluku dan Indonesia.

Ilmuwan sosial Perancis, Pierre Bourdieu, melalui "teori praktis"-nya membentangkan sebuah perspektif untuk menelisik bagaimana makna-makna historis, sosiologis, budaya dan politis saling terjalin dalam berbagai ekspresi sosial keseharian melalui bahasa, struktur tradisi lokal, relasi antaragama serta penampilan simbolis melalui adat dan ritual adat (Islam dan Kekristenan). Konsep habitus Bourdieu digunakan untuk menjembatani keretakan epistemologis yang menandai analisis sosiologis yang kerap terperangkap dalam dikotomi "objektif" (struktural) dan "subjektif" (aktor). Kedua matra itu ditempatkan bersama-sama dengan proses "struktur yang dibentuk" dan "struktur yang membentuk" yang menggerakkan dinamika sosial dan historis dari masyarakat.

Muara dari riset (dan penulisan) ini pada akhirnya hendak menggambarkan bahwa strategi pembangunan komunitas lokal, dalam arti luas dan fundamental, dapat diterapkan dengan memahami pandangan dunia komunitas lokal sebagai manifestasi kesadaran historis dan budaya, yang dibentuk melalui pengalaman kehidupan yang panjang dan dinamis. Studi ini menawarkan sebuah perspektif tentang strategi kebudayaan untuk pembangunan masyarakat majemuk agar harmoni, imbang, dan saling menghormati. Tulisan ini berargumen, nilai-nilai intrinsik dari tradisi lokal sebagai fondasi untuk menyerap perubahan sosial yang sejalan dengan kearifan lokal adalah modal sosial dan modal budaya masyarakat Leihitu dalam membangun relasi harmoni dan damai antarkelompok masyarakat yang berbeda agama.

Kata Kunci: Kata kunci: Leihitu, identitas, habitus, modernitas, transformasi sosio-budaya

Pendahuluan

Studi ini untuk memahami proses-proses pembentukan identitas sosio-religius melalui penelusuran sejarah dan kontestasi identitas dalam kehidupan sosial kontemporer sehari-hari komunitas Muslim dan Kristen Leihitu di Ambon, terutama Wakal dan Hitumesing (Muslim) dan Rumahtiga (Kristen). Masyarakat Muslim dan Kristen di ketiga negri (desa atau *nagari*) tersebut mengakui mempunyai hubungan *gandong* (saudara kandung) sejak leluhur mereka.

Dalam banyak hal, performa kebudayaan Muslim Leihitu memperlihatkan konservasi tradisi Islam Ambon hingga saat ini meskipun beberapa aspek telah mengalami perubahan. Akan tetapi, selain resistensi menentang penguasa kolonial, sejarah Leihitu dan kehidupan sosialnya sarat dengan konflik-konflik internal baik antarkampung maupun antarkeluarga. Penyebab dan jangkauan konflik-konflik tersebut bermacam-macam: dari soal batas tanah antara negri-negri yang bertetangga dan perkelahian antarakelompok pemuda hingga ketegangan-ketegangan sekitar otoritas kebudayaan di kalangan keluarga elite serta keturunan atau para pengikutnya. Beberapa konflik dapat diselesaikan melalui pendekatan kebudayaan atau ritual-ritual adat yang dimediasi oleh para tetua adat.

Ada konflik-konflik lain yang potensial bahkan memuncak menjadi permusuhan antarnegri yang solusi akhirnya menggunakan pendekatan hukum positif. Tentang hal itu, berdasarkan hasil penelitian lapangan di Hila, Frans von Benda-Beckmann dan Tanja Taale memperlihatkan bahwa konflik-konflik di Leihitu antara lain disebabkan oleh ambiguitas persepsi mengenai hak-hak kepemilikan berkaitan dengan sertifikasi tanah, perputaran uang, atau perubahan dalam penggunaan tanah (Mearns and Healey 1996: 53-57).

Variabel-variabel dinamika budaya, proses konstruksi identitas sebagai Muslim/Kristen dan orang Ambon, relasi dengan Islam/Kristianitas dan perubahan sosial yang terjadi sejak zaman pra-kolonial, kolonial dan pascakolonial mendorong saya untuk meneliti lebih lanjut imajinasi keagamaan dan konstruksi sosial yang berlangsung dalam praktik kehidupan serta pengalaman keseharian masyarakat setempat berhadapan dengan liyan (orang / kelompok lain) dan perbedaan di Leihitu. Resistensi dan negosiasi merupakan bagian dari strategi kebudayaan mereka untuk memahami dan mengakomodasi berbagai perubahan dan perbedaan.

Nilai-nilai keagamaan, ritual-ritual, interpretasi-interpretasi simbolik tentang yang sakral, dan praktik kehidupan sehari-hari berbasis pada model spiritualitas Islami dan interpretasi tekstual Al-Quran dapat dilihat sebagai modal budaya mereka untuk bertahan dan menjaga batas-batas identitas. Dialektika nilai-nilai Islam/Kristen dan kebudayaan lokal telah dipahami bukan sebagai dua matra yang berbeda dan terpisah, tetapi sebagai perpaduan modal budaya yang memperlihatkan identitas mereka sebagai Ambon-Muslim (*Salam*) dan Ambon-Kristen (*Sarane*).

Penelitian ini dilakukan dengan fokus amatan pada dua negri Muslim (Wakal dan Hitumesing) dan satu negri Kristen (Rumahtiga) di Jazirah Leihitu, Pulau Ambon. Pengamatan diarahkan pada dinamika sosial dalam relasi-relasi sosial sehari-hari di kalangan komunitas Muslim dan Kristen di Leihitu. Berbagai ketegangan dan benturan internal sering terjadi, terutama antara generasi tua dan muda, kaum modernis dan tradisionalis, sebagai tanggapan dan reaksi kritis terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi baik pada konteks lokal (Leihitu dan Ambon) maupun konteks nasional Indonesia. Selain itu, pemahaman mereka tentang identitas keagamaan dan kebudayaan sangat kuat dipengaruhi oleh interaksi antara Ambon-Muslim dan Ambon-Kristen yang memperlihatkan ambiguitas dan fleksibilitas kontestasi identitas dalam preferensi-preferensi keberagamaan (Islam-Kristen) dan etnisitas (orang Ambon).

Sejumlah pertanyaan penting yang diteliti dan dikaji lebih lanjut, antara lain: (1) bagaimana transformasi sosio-budaya berlangsung dalam komunitas-komunitas Ambon kontemporer di Leihitu, Pulau Ambon?; (2) apa yang telah dan sedang menjadi konteks sosial dan historis yang di dalamnya orang Ambon-Muslim dan orang Ambon-Kristen memahami dan menampilkan identitas keagamaan mereka dalam komunitas bhineka-tunggal-ika pasca konflik sosial di Ambon 1999-2005?; (3) melalui

proses-proses apa (perbedaan dan persamaan) orang Ambon-Muslim dan orang Ambon-Kristen di Leihitu menegosiasikan agama dan adat berhadapan dengan proses modernisasi atau perubahan sosial masyarakat Indonesia?

Tujuan riset dan studi ini adalah: (1) memahami cara-cara komunitas-komunitas Muslim/Kristen memperlihatkan identitas keagamaan mereka dalam kehidupan praktis sehari-hari (ritual, bahasa, simbol keagamaan); (2) melakukan interpretasi penandaan simbolik oleh komunitas-komunitas tersebut dalam hubungan dengan konstruksi keberbedaan (*otherness*) melalui kehidupan praktis sehari-hari dan narasi budaya bersama; (3) mengamati proses-proses politik dan relasi-relasi kuasa dalam ritual agama-budaya dan praktik kehidupan yang dalamnya agama dan kebudayaan berpadu; (4) membangun strategi kebudayaan yang kontekstual untuk mempertahankan integrasi sosial berhadapan dengan berbagai perubahan sosial dan modernisasi dalam masyarakat majemuk Indonesia.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan paradigma penelitian antropologis yang bertujuan untuk memahami dinamika kebudayaan pada tiga negri di Leihitu, sebelah utara Pulau Ambon: dua negri Muslim (Hitumesing dan Wakal) dan satu negri Kristen (Rumahtiga). Penelitian dilakukan dengan menerapkan tiga pendekatan: (1) observasi partisipatoris yang dengannya peneliti terlibat aktif dalam kehidupan sehari-hari komunitas yang diamati dan mengalami langsung berbagai ekspresi, ritual, kegiatan keagamaan dan percakapan kehidupan selama kurang lebih setahun di tiga negri tersebut; (2) mewawancarai sejumlah informan kunci terpilih yang dianggap berkompeten dan bersedia berbagi perspektif mereka dengan dipandu oleh pedoman wawancara (Denzin and Lincoln 1994: 248-261); (3) studi kepustakaan untuk menelusuri berbagai sumber literatur yang tersedia dan menghadapkannya secara dialektis dan dialogis dengan temuan-temuan penelitian lapangan. Data kualitatif yang diperoleh dari catatan penelitian lapangan dan wawancara dianalisis dengan menggunakan lensa interpretasi budaya untuk menggali makna di balik perilaku sosial, peristiwa-peristiwa budaya dan narasi-narasi sosial yang relevan dengan desain dan tujuan penelitian.

Dinamika budaya disini terdiri dari pengalaman-pengalaman tertentu dan habitus, seperti resistensi dan konflik internal-eksternal, pola-pola negosiasi budaya untuk mencapai integrasi sosial dan/atau menegaskan perbedaan-perbedaan melalui kata-kata, ungkapan-ungkapan, atau bahasa tubuh tertentu dalam menyatakan kesepakatan dan penolakan. Variabel-variabel ini mempunyai signifikansi budaya yang pada gilirannya akan diinterpretasi sebagai pemahaman budaya yang terinterkoneksi mengenai identifikasi diri pada konteks sosial-budaya tertentu (Smith 2006: 142-162).

Tinjauan Pustaka

Karya-karya Frank Cooley (1961), Dieter Bartels (1977) dan Richard Chauvel (1990) merupakan tiga kepustakaan dasar yang menstimulasi inspirasi untuk melakukan studi ini. Studi Cooley (1961) tentang hubungan antara institusi-institusi agama dan pemerintahan lokal dalam masyarakat tradisional di Maluku Tengah menyajikan banyak data dan interpretasi sosiologis mengenai peran dan hubungan aktor-aktor religius dan budaya yang berupaya mengontekstualisasikan Kristianitas dalam nalar budaya orang Ambon-Kristen, yang mewujud dalam bentuk apa ia sebut "Agama Ambon".

Bartels (1977) menulis suatu "deskripsi tebal" dan analisis kritis tentang aliansi antarnegri yang disebut *pela* dan konstruksi identitas di kalangan orang Ambon-Muslim dan Ambon-Kristen melalui hubungan-hubungan *pela*. Dia menganalisis sejarah *pela* dan proses-proses konfigurasinya serta transformasi *pela* melalui "penciutan semantik" (*semantic depletion*) dan "perluasan semantik" (*semantic accretion*). Konfigurasi *pela* dan dampak budayanya terhadap komunitas-komunitas berbeda agama kemudian membentuk pengertian tersendiri di kalangan orang Ambon dalam apa yang disebutnya

sebagai "Agama Nunusaku", suatu bentuk religiositas berbasis pada sejarah mitis bahwa semua orang Maluku, tak pandang apa agamanya, berasal dari satu ranah imajiner Gunung Nunusaku.

Analisis sejarah Chauvel tentang Kepulauan Ambon sejak kolonialisme hingga pemberontakan (1880-1950) adalah penelusuran sejarah yang komprehensif yang menyingkap matra-matra keagamaan dan politis dari hubungan orang Ambon-Muslim dan orang Ambon-Kristen. Seperti Cooley dan Bartels, dia juga memberi penekanan pada identitas yang terinterkoneksi dan konstruksi ideologis orang Ambon sebagai ranah penting untuk memahami masyarakat Ambon saat ini. Konstruksi identitas di kepulauan Ambon telah dideterminasi oleh apa yang disebutnya sebagai tradisi sejarah bersama (*common historical tradition*).

Konflik sosial yang massif di Ambon (1999-2005) telah mendorong sejumlah sarjana untuk melakukan penelitian lebih lanjut: Lukas Batmomolin (2000), Kathleen T. Turner (2006), Tonny D. Pariela (2008), M. Najib Azca (2011), R. Alpha Amirrachman (2012), Sumanto (2013), Birgit Bräuchler (2013) dan Y. Tri Subagya (2015). Penelitian mereka telah membuka sejumlah perspektif yang lebih luas mengenai perubahan sosial dan konfigurasi budaya di Maluku, khususnya selama dan pasca-konflik itu. Berbagai eksplorasi teoretis seperti yang tampak dalam penelitian-penelitian tersebut membuka cakrawala baru untuk memahami konteks kontemporer Maluku dan Ambon. Untuk konteks Leihitu, karya klasik Manusama yang didasarkan pada penelitian disertasinya tahun 1977 adalah salah satu karya komprehensif mengenai sejarah sosial Muslim Leihitu. Penelitian-penelitian kontemporer mengenai komunitas Muslim Leihitu telah dilakukan oleh Franz von Benda-Beckmann dan Keebet von Benda-Beckmann dengan fokus di Hila (2007).

Kajian saya mengambil sudut pandang yang berbeda dengan riset-riset dan literatur sebelumnya. Warga ketiga negri yang saya teliti mengakui bahwa para leluhur mereka adalah saudara kandung: Wakal adalah saudara laki-laki tertua, Hitumesing adalah saudara laki-laki tengah dan Rumahtiga adalah saudara perempuan bungsu. Warga ketiga negri ini menyimpan narasi bersama tentang hubungan kandung para leluhur mereka melalui tradisi lisan dari generasi ke generasi dan tidak pernah meritualkan hubungan *gandong* ini dalam bentuk ritual *panas-gandong* hingga pasca-konflik Ambon tahun 2011. Setelah diritualkan, narasi ini kemudian menjadi legitimasi politik secara internal untuk mendaku *matarumah* (keluarga besar) yang punya otoritas untuk memegang kekuasaan sebagai raja pada masing-masing negri.

Hubungan saudara kandung dan narasinya juga digunakan sebagai strategi kebudayaan untuk menegosiasikan identitas berkaitan dengan implementasi UU No. 5 tahun 1979 tentang sistem pemerintahan desa selama pemerintahan Presiden Suharto dan desentralisasi pada periode-periode pemerintahan pasca-Suharto. Sekaligus identitas keagamaan dan otoritas budaya berfungsi untuk menerima berbagai perubahan sosiopolitik dari tingkat nasional hingga lokal (desa), dan punya posisi tawar untuk membentuk suatu tipe-ideal identitas sosial kontemporer dengan terus menyadari ko-eksistensi Muslim-Kristen sebagai perangkat lunak budaya mereka kini. Pada titik itu, studi ini memiliki kepentingan khusus untuk menyingkap matra-matra kebudayaan yang penting dipertimbangkan sebagai suatu pendekatan kebudayaan yang baru untuk membangun masyarakat Ambon pasca-konflik.

Latar belakang penelitian pada tiga negri tersebut memperlihatkan proses-proses sosio-budaya yang dengannya orang mengonstruksi pemahaman mereka tentang sejarah, perubahan sosial, relasi-relasi kuasa dan kontestasi identitas berbasis matra-matra budaya dan agama. Secara esensial, sejarah agama-agama, terutama Islam dan Kristen, di Maluku adalah sejarah politik ekonomi. Anthony Reid (1993: 132) menyatakan secara gamblang dalam konteks Asia Tenggara: "*More than half the population of Southeast Asia adopted Islam or Christianity in some sense during the Age of Commerce*." Dia menjelaskan lebih lanjut dengan lingkup kajian sejarah yang lebih luas tentang dinamika sosial dan kompleksitas Asia Tenggara yang dengannya orang dapat menemukan banyak aspek saling terjalin, seperti kepentingan ekonomi, pertarungan kekuasaan, konstruksi identitas etnik, kontestasi agama dan lain-lain.

Kerangka Teoretik

Paradigma

Penelitian ini didasarkan pada salah satu paradigma dalam kajian antropologi politik, yaitu paradigma prosesual, yang memusatkan perhatian pada struktur-struktur sosial-politik dalam masyarakat yang diamati, konstruksi sejarah dari relasi-relasi kuasa antara aktor-aktor sosial, fungsi mitos budaya dan ritual dalam membentuk relasi sosial dan pembagian kuasa antar-pribadi, klan atau kelompok, strategi berbasis budaya untuk mengejar tujuan-tujuan bersama, dan legitimasi sakral para pemimpin yang secara sosial dilihat sebagai persinggungan antara otoritas spiritual dan politik (Kurtz 2001: 9-10). Beberapa konsep utama seperti kuasa, legitimasi, dukungan, faksi, kepemimpinan, konflik, ranah politik, arena politik, dan yang lainnya tersusun dalam bingkai diakronik yang menganalisis semuanya sebagai proses-proses temporal dan spasial (Kurtz 2001: 104).

Identitas sebagai Proses Signifikasi

Konsep identitas yang dikemukakan oleh Peter Burke dan Jan Stets (2009) serta Richard Jenkins (2008) akan digunakan sebagai definisi kerja dalam penelitian ini. Mereka menyatakan bahwa identitas mempunyai dwi-matra konstruktif, yakni individual dan sosial. Setiap orang memiliki "banyak identitas" (*multiple identities*) lantaran setiap orang/kelompok memainkan banyak peran, anggota dari banyak kelompok, mendaku dirinya sebagai pribadi dengan banyak karakter, dan juga saling berbagi banyak pemaknaan identitas sebagai anggota masyarakat.

Meskipun menekankan lebih pada identitas individual tetapi mereka menyadari bahwa seorang individu tidak dapat dipisahkan secara total dari masyarakat atau struktur sosial dan menjalani kehidupannya dalam masyarakat. Alih-alih memahami identitas sebagai "sesuatu", identitas seyogyanya dipahami sebagai suatu proses signifikasi yang dilakukan oleh manusia dalam seluruh kehidupannya secara individual dan/atau kolektif. Proses signifikasi tersebut selalu berlangsung dalam konteks tertentu – sangat dipengaruhi olehnya–dimana seseorang hidup dan beraktivitas. Identitas selalu dalam suatu proses menjadi dan bukanlah "sesuatu" yang dapat dimiliki oleh seseorang melainkan "dilakukan" (Jenkins 2008: 17).

Identitas manusia, pertama-tama, merupakan identitas sosial, yang berarti signifikasi "diri" atau "liyan" menjadi ihwal pemaknaan yang melibatkan interaksi: kesepakatan dan ketidaksepakatan, konvensi dan inovasi, komunikasi dan negosiasi. Kedua, untuk membuat diferensiasi secara analitis antara "sosial" dan "budaya" yang tidak merepresentasikan realitas-realitas yang tampak dari dunia manusia. Sosial dan budaya adalah matra-matra yang terkandung dalam proses signifikasi dan yang olehnya manusia menjelaskan identitasnya.

Kebudayaan, Kuasa dan Reproduksi

Semua simbol kebudayaan dan praktik hidup seperti citarasa artistik, gaya berbusana, kebiasaan makan, bahkan agama, sains, filsafat dan bahasa, merepresentasikan kepentingan dan fungsi untuk memperluas distingsi sosial (Bourdieu and Wacquant 1992: 142). Pergulatan untuk melakukan distingsi sosial, apapun bentuk simboliknya, adalah dimensi utama dalam semua kehidupan sosial (Swartz 1997: 6).

Pierre Bourdieu memberi perhatian teoretis terhadap isu-isu relasi-relasi kuasa di kalangan individu, kelompok dan institusi. Kuasa berada pada jantung semua kehidupan sosial dan bukan ranah terpisah dalam studi ini, dimana pemberlakuannya membutuhkan legitimasi. Kuasa simbolik berhubungan dengan konseptualisasi seluruh sistem simbolik yang secara simultan memperlihatkan tiga fungsi berbeda namun saling terhubung: (1) kognisi – sistem-sistem simbolik sebagai "struktur pembentuk": sebagai sarana untuk menata dan memahami dunia sosial. Bahasa, mitos, seni, agama dan sains, dalam arti

ini, merepresentasikan cara-cara yang berbeda untuk mengenal dunia; (2) komunikasi – sistem-sistem simbolik adalah "struktur yang dibentuk" atau "kode" yang berfungsi sebagai instrumen komunikasi dan instrumen pengetahuan, yang mendorong fungsi komunikasi dan integrasi sosial; (3) diferensiasi sosial – tidak hanya memberikan fungsi kognitif dan integratif, sistem-sistem simbolik juga berfungsi sebagai instrumen dominasi.

Isu Agensi dan Struktur

Bourdieu menggunakan metode relasional sebagai instrumen dasar untuk menjembatani keretakan epistemologis bentuk-bentuk subjektivis dan objektivis pengetahuan. Berkaitan dengan agensi/struktur, dia mencoba menghubungkan agensi dan struktur dalam suatu relasi dialektis yang melaluinya bergerak secara analitis melampaui dikotomi subjektif-objektif dengan mengonseptualisasi tindakan sebagai pemikiran integratif yang dengannya matra-matra mikro/makro, voluntaris dan determinis disatukan menjadi satu gerakan konseptual daripada mengisolasinya sebagai bentuk-bentuk eksplanasi yang saling tertutup.

Dengan membangun teori struktural tentang praktik, Bourdieu mencoba untuk menghubungkan tindakan dengan kebudayaan, struktur dan kuasa. Individu dan masyarakat bukanlah dua bentuk mengada yang terpisah melainkan selalu merupakan dua matra yang terinterkoneksi atau relasional dari satu realitas sosial (Swartz 1997: 96). Ide bahwa aktor-aktor adalah pelaku-pelaku strategi praktis dikaitkan dengan struktur-struktur sosial melalui konsep habitus:

> (1) '*a system of lasting, transposable dispositions which, integrating past experiences, functions at every moment as a matrix of perception, appreciations, and actions and makes possible the achievement of infinitely diversified tasks, thanks to analogical transfers of schemes permitting the solution of similarly shaped problems' and the second*; (2) '*a system of durable, transposable dispositions, structured structures predisposed to function as structuring structures, that is, as principles which generate and organize practices and representations that can be objectively adapted to their outcomes without presupposing a conscious aiming at ends or an express mastery of the operations necessary in order to attain them*' (Bourdieu 1990: 53).

> [(1) "suatu sistem watak yang langgeng dan dapat diwariskan, yang mengintegrasikan pengalaman-pengalaman masa lampau dan berfungsi setiap saat sebagai matriks persepsi, apresiasi dan tindakan yang memungkinkan suatu pencapaian tugas-tugas yang tak terbatas, berkat peralihan analogis berbagai skema bagi solusi dari masalah-masalah sejenis"; (2) "suatu sistem watak yang berdaya tahan lama dan dapat diwariskan, struktur-struktur yang dibentuk yang cenderung berfungsi sebagai struktur-struktur pembentuk, yaitu sebagai prinsip-prinsip yang mendorong dan menata berbagai praktik dan representasi yang dapat disesuaikan secara objektif dengan hasil-hasilnya tanpa mengandaikan suatu tujuan sadar pada akhirnya atau suatu penguasaan terhadap berbagai operasi yang dibutuhkan untuk mendapatkannya."]

Ranah Kuasa

Praktik berlangsung dalam berbagai arena konflik yang terstruktur yang disebut ranah (*field*). Konsep ini mempertautkan tindakan habitus dengan struktur-struktur kuasa yang terstratifikasi dalam masyarakat modern, "*an array of relatively autonomous but structurally homologous fields of production, circulation, and consumption of various forms of cultural and material resources*" (Swartz 1997: 9). Ranah mengantarai relasi antara struktur sosial dan praktik budaya, serta mendefinisikan struktur suatu latar sosial yang di dalamnya habitus beroperasi.

Ranah menjadi arena produksi, sirkulasi dan penyesuaian jasa, layanan, pengetahuan, atau status, dan posisi-posisi kompetitif oleh para aktor dalam perjuangan mereka untuk mengakumulasi dan memonopoli berbagai jenis kapital. Hal itu dapat dilihat sebagai ruang-ruang terstruktur yang diorganisir dari beberapa model kapital atau kombinasi kapital. Pengertian "ruang" *per se* memuat prinsip suatu pemahaman relasional tentang dunia sosial. Pengertian itu juga menegaskan bahwa setiap realitas menandai tempat berlangsungnya eksterioritas timbal-balik dari unsur-unsur yang bersenyawa. Hal-hal yang tampak, apakah invidivu atau kelompok, ada dan hidup di dalam dan melalui perbedaan yang menempati posisi-posisi relatif dalam suatu ruang relasi-relasi yang merupakan realitas dan prinsip nyata dari perilaku individu dan kelompok (Bourdieu 1998: 31).

Identitas Keagamaan dan Modernitas

Realitas dan identitas keagamaan secara fundamental merupakan refleksi sisi-sisi dialektis antara agensi (pemimpin agama, tokoh kharismatik) dan struktur sosial (institusi agama dan organisasi sosial). Pemahaman tentang identitas keagamaan dalam kerangka itu membawa untuk melihat lebih jauh bahwa dalam konstruksi identitas keagamaan orang memasukkan dua unsur kepercayaan, yakni kepercayaan kepada kuasa ilahi dan kepercayaan bahwa kuasa ilahi itu dapat diteruskan kepada dan direproduksi oleh liyan. Kepercayaan-kepercayaan tersebut masuk ke dalam arena relasi-relasi kuasa yang di dalamnya berlangsung proses-proses negosiasi antara diri dan liyan; kelompok-dalam dan kelompok-luar; individu dan sosial. Dalam perspektif metode relasional Bourdieu, ini adalah ruang sosial yang menarik kepentingan-kepentingan individu dan sosial untuk berjumpa satu sama lain dan menciptakan jejaring makna simbolik dalam masyarakat.

Konteks Asia Tenggara secara khusus membawa pada kompleksitas dan dinamika agama dan modernitas. Umumnya, modernisasi dipahami melalui kombinasi diferensiasi dan rasionalisasi yang dengannya sejumlah parameter ditentukan, seperti titik berat pada individualisme, politik demokratis, nilai-nilai liberal, norma-norma efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Hal itu merusak tatanan tradisi dengan cara memutuskan fondasi-fondasi komunal dan sosial yang mendukung agama sebagai institusi tradisional (Turner 2011: 10).

"Modernitas" dalam studi ini tidak lagi dijangkarkan pada proses unilinear modernisasi dan modernitas global-tunggal, tetapi pada berbagai bentuk modernitas, yakni *multiple modernities*, karena modernitas dan westernisasi tidaklah identik. "*Against conventional convictions, which emphasize the primacy of the economic system as the substructure of society, the conception of multiple modernities highlights the cultural dimensions of modernity and its locally specific characteristics.*" ["Bertolak belakang dengan keyakinan-keyakinan konvensional, yang menekankan keutamaan suatu sistem ekonomi sebagai sub-struktur suatu masyarakat, konsep modernitas jamak menyoroti matra-matra kebudayaan dari modernitas dan berbagai karakteristik lokal yang spesifik."] (Gottowik 2014: 12)

Orang Ambon di Era Pasca Orde Baru: Rekonsiliasi dan Renegosiasi Identitas

Konflik sektarian meledak di Ambon pada 19 Januari 1999 tepat pada hari Ketika umat Muslim sedang merayakan Idul Fitri. Umat Islam dan umat Kristen tersentak oleh konflik itu karena mereka sama sekali tidak memahami apa sebenarnya yang menjadi pemicu dari konflik yang kemudian membara selama kurang-lebih empat tahun, dengan residu konflik yang masih menggurat hingga saat ini.

Beberapa konflik sektarian juga terjadi sebelumnya di Poso (Sulawesi Tengah) dan Sampit (Kalimantan Tengah). Konflik-konflik tersebut, seperti halnya konflik Ambon, tidak dapat dipahami tanpa melakukan penelusuran historis dan proses-proses sosial-politik dalam konteks Indonesia yang lebih luas, yaitu sistem politik dan pola-pola kebudayaan masyarakat Indonesia sebagai produk dari

sejarah dan politik kolonial, yang kemudian diikuti oleh terbentuknya rezim-rezim otoritarian pasca-kemerdekaan Indonesia (Colombijn and Lindblad 2002).

Pembangunanisme *ala* Orde Baru dan perubahan-perubahan dalam sistem politik pasca-Suharto, terutama demokratisasi dan desentralisasi, sejatinya menegaskan secara sistematis segregasi sosial dan marjinalisasi kebudayaan yang berlangsung puluhan tahun dalam masyarakat Ambon. Pembangunanisme telah menciptakan tidak hanya masalah-masalah urbanisasi tapi juga, terutama di Kota Ambon, masalah deagrarianisasi. Deagrarianisasi ini terutama terkait dengan urbanisasi yang di dalamnya para petani meninggalkan tanah-tanah mereka untuk mencari pekerjaan di kota, dan tinggal di wilayah pinggiran. Jika para pekerja di Jawa sebagian besar terserap ke dalam berbagai industri, sejumlah besar kelompok yang mengalami deagrarianisasi di kawasan luar Jawa harus bersaing ketat untuk merebut posisi-posisi dalam birokrasi pemerintahan. Dalam kasus ini, Provinsi Maluku menduduki prosentase tertinggi.

Sementara itu, desentralisasi berujung pada fragmentasi wilayah atau yang sering disebut dengan eufemisme "pemekaran daerah". Arena kompetisi kemudian makin meluas lingkupnya hingga ke tingkat masyarakat akar-rumput di desa-desa dan kaum urban klas bawah. Relasi-relasi kuasa bergeser lantaran munculnya patron-patron politik baru yang beralih dari ikatan budaya (kekerabatan) tapi masih memainkan isu identitas primordial (klan, negri, agama) ke kompetisi untuk meraih kekuasaan politik dan dana pemerintah. Alih-alih mengatasi ketegangan-ketegangan lokal, seperti tujuan idealnya, desentralisasi malah memprovokasi konflik-konflik lokal di berbagai daerah terkait kompetisi para kepala daerah baru. Desentralisasi membuka arena yang lebih luas bagi kontestasi politik di kalangan elite. Para elite ini membangun kekuasaan mereka pada basis koneksi lokal-nasional dan memainkan peran mereka sebagai *intermediate class* (Harriss-White 2003: 44).

Masyarakat Ambon mengalami *social-psychological dissonance* dan berpotensi menjadi agen-agen pemicu konflik yang terlibat dalam arena pertarungan kekuasaan struktural negara sekaligus menjadi korban dari situasi yang oleh Klinken (2007: 105) disebut sebagai *security dilemma*. Ini yang menyebabkan mengapa mobilisasi sosial begitu cepat terbangun dan bertahan bertahun-tahun selama konflik di Ambon. Klinken menyebutkan bahwa selama pasca Orde Baru dan pasca-konflik di Ambon terdapat tiga modal sosial, yaitu pegawai negri, Gereja Protestan Maluku dan ICMI.

Agama, Etnisitas dan Politik Lokal: Arena Kontestasi Identitas

Agama dan etnisitas merupakan variabel-variabel budaya yang memainkan peran penting di sepanjang sejarah dan relasi-relasi sosio-politik dalam masyarakat di Maluku Tengah. Sudah sejak periode kolonial, Belanda mengimplementasikan strategi politik apartheid untuk memecah-belah masyarakat terjajah melalui garis agama dan kelompok etnis. Sejak itu, isu-isu identitas agama dan etnisitas telah terintegrasi dalam *mindset* budaya orang Maluku.

Mindset budaya yang segregatif tersebut memperkeras konstruk identitas agama dan identitas etnis dalam sistem politik Indonesia yang pada dasarnya didasarkan pada konteks masyarakat yang multikultur. Sejumlah peneliti lain telah memperlihatkan bahwa berbagai kebijakan politik dan program pembangunan nasional dipengaruhi oleh tendensi-tendensi agama dan etnisitas, seperti pada era Orde Baru yang menciptakan dikotomi "pusat-pinggiran", "nasional-daerah" atau "Jawa dan luar-Jawa".

Dalam konteks Maluku, relasi-relasi antaragama dan antaretnis adalah hal yang nyata dalam kehidupan sosial masyarakat kepulauan ini, bahkan sebelum kedatangan para saudagar Eropa. Akan tetapi, identitas politik yang diteguhkan sebagai suatu instrumen ideologis oleh kekuasaan-kekuasaan kolonial dan neo-kolonial menjadi realitas dan mentalitas politik yang terserap menjadi habitus dalam berbagai dinamika sosio-politik, ekonomi dan kebudayaan di kepulauan timur nusantara ini.

Sejumlah sarjana telah melakukan eksplorasi historis dan sosiologis yang memperlihatkan bahwa segregasi komunitas berbasis identitas agama di Maluku telah diciptakan oleh pemerintah kolonial pada masa lalu dan dilanggengkan oleh pemerintah Indonesia hingga kini. Hal itu bisa dilihat misalnya

pada struktur pengorganisasian masyarakat desa/negri yang homogen berdasarkan identitas agama, satu negri satu agama. Konteks sosio-budaya ini mempengaruhi relasi-relasi sosial antarnegri di Maluku, khususnya antarnegri yang berbeda afiliasi keagamaannya. Fakta ini juga memicu sebagian besar konflik lokal antarnegri dan memperkuat sentimen-sentimen primordial di kalangan kelompok-kelompok etnis, misalnya Hitu dan Hatuhaha.

Menjadi Muslim di Leihitu

Hitumesing dan Wakal adalah dua dari 16 negri Muslim di sebelah utara Pulau Ambon, yang dikenal dengan sebutan Jazirah Leihitu. Tradisi Islam di wilayah pesisir ini dianggap sebagai yang tertua di samping Islam di Hatuhaha, Pulau Haruku (Rumahuru 2012). Sejarah Islam di Maluku memperlihatkan bahwa Islam diintroduksi melalui koneksi-koneksi politik dan perdagangan. Perkembangan Hitu sebagai suatu pusat perdagangan setelah Kesultanan Ternate dan Tidore merupakan konsekuensi dari berkembangnya usaha-usaha perdagangan rempah-rempah dengan para pedagang Muslim dari berbagai wilayah nusantara.

Karakteristik Islam di Leihitu, khususnya di Hitumesing dan Wakal, terutama memperlihatkan perpaduan matra-matra keagamaan, politik, ekonomi dan kebudayaan. Selain identitas keagamaan, masyarakat kedua negri itu memahami dan mempraktikkan Islam secara holistik yang terintegrasi dengan identitas politik, ekonomi dan kebudayaan. Perpaduan itu dapat dilihat pada lokasi rumah raja yang berhadap-hadapan seberang jalan dengan masjid raya. Posisi itu menandai otoritas raja (adat) dan matra keagamaan Islam bergandengan tangan dan saling interpenetrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Pada hari raya Islam, jamaah dan para pemimpin adat duduk pertama di masjid menunggu kedatangan raja. Dua kelompok adat, yaitu *Tawa* (Hitulama) dan *Timua* (Hitumesing) akan menjemput para raja dari dua negri dan mengantar mereka dengan prosesi yang disebut *sanepa* hingga tiba di masjid raya. Raja dan imam mempunyai tempat tersendiri di barisan terdepan dalam masjid.

Kehidupan keagamaan di Hitumesing dan Wakal berpusat pada masjid. Ibadah dan pemeliharaan masjid dilakukan oleh beberapa petugas: imam (pemimpin shalat lima waktu); khatib (pengkhotbah pada shalat Jumat); modin (pemimpin doa). Imam masjid sekaligus menjadi imam negri. Meskipun tidak ada pemeringkatan kerja secara resmi tapi imam masjid dianggap sebagai pemimpin utama dalam semua urusan keagamaan di negri. Dalam struktur *kasisi negri* imam masjid menempati posisi di bawah otoritas raja.

Organisasi-organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tidak terlalu berpengaruh dan hanya sebagian kecil warga Hitumesing dan Wakal yang menjadi anggota resminya. Imam Hurasan menyatakan bahwa tradisi Islam di Leihitu adalah “Islam tua” dibandingkan dengan NU atau Muhammadiyah yang disebutnya sebagai “Islam muda”. Orang Leihitu bangga dengan tradisi Islam mereka sendiri. Namun, jika diminta untuk memilih, mereka lebih condong pada NU karena dianggap lebih luwes dalam memahami dan mempraktikkan “Islam budaya” yang cocok dengan karakteristik keagamaan Islam di Leihitu. Raja tua (senior) Hitumesing, Abdullah Pelu, menyatakan bahwa Muslim Leihitu akan enggan menerima ide dan praktik Islam yang mencoba mempertanyakan pengaruh adat dalam ekspresi keagamaan mereka dan/atau mendesak suatu gerakan purifikasi keagamaan semata-mata berdasarkan tafsir harfiah terhadap Al-Quran. Menurut Pelu, orang Hitu tidak bisa memahami Islam yang terlepas dari kebudayaan lokal. Jika demikian, maka mereka sebenarnya hanya menjadi Arab tapi bukan Islam yang sejati.

Gambar 1

Persiapan Tarian Cakalele Rumahtiga dalam Acara Panas Gandong Tiga Negri

Rumahtiga: Pemisahan Agama dan Adat

Seperti sebagian besar negri Kristen di Kepulauan Maluku, sejak periode kolonial sudah terjadi pemisahan antara urusan gereja dan negara. Namun demikian, dalam banyak hal intervensi gereja tidak terhindari bahkan sangat dominan dalam ranah politik di suatu negri. Juga terbukti bahwa otoritas gereja (pendeta) lebih besar daripada otoritas raja, terutama sejak Pendudukan Militer Jepang tahun 1942 (Chauvel 1990). Banyak peristiwa di Maluku yang memperlihatkan ketegangan-ketegangan antara pendeta dan raja, yang berpotensi meluas menjadi konflik internal dengan melibatkan sejumlah keluarga (*mataruma*) dan *soa* (himpunan *mataruma*) dalam masyarakat negri atau jemaat.

Implementasi UU No. 5 tahun 1979 tentang Sistem Pemerintah Desa pada masa lampau telah mereduksi otoritas budaya raja dan mengubah status raja sebagai kepala desa. Perubahan itu telah memicu konflik ganda: (1) memperkuat otoritas keagamaan gereja dalam menangani isu-isu sosial di suatu negri lantaran kredibilitas budaya kepala desa merosot dan tidak dipercaya; (2) sebaliknya, otoritas kepala desa menguat karena ditopang oleh lembaga-lembaga struktural negara. Dengan demikian, penanganan masalah-masalah sosial di suatu negri akan menggunakan pendekatan legal yang melibatkan aparatur negara seperti polisi dan tentara, terutama dalam penyelesaian konflik-konflik di suatu negri dan/atau antarnegri.

Sebagai suatu lembaga formal keagamaan, gereja menyusun program-program pelayanannya sendiri yang diatur melalui mekanisme pengorganisasian yang rapi dan hierarkhis pada tingkatan jemaat, klasis dan sinode. Program-program jemaat telah dilembagakan dan disepakati melalui forum sidang jemaat yang melibatkan perwakilan setiap unsur pelayanan: sektor, unit, pelayanan lelaki, pelayanan perempuan, pelayanan remaja dan pemuda, Sekolah Minggu/Tunas Pekabaran Injil. Selain itu, pelayanan kejemaatan sebagian besar terkonsentrasi pada berbagai bentuk ibadah dari unsur-unsur pelayanan yang ada.

Di Jemaat Rumahtiga, menurut Pdt. Elifas Maspaitella (wawancara, Ambon, September 2014), gereja mengambil peran untuk memediasi berbagai konflik pribadi atau keluarga. Mereka mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda dan terlibat dalam konflik-konflik internal di luar domain gereja tapi pada kenyataannya mampu disatukan dan bekerja sama dalam pelayanan gereja sebagai majelis jemaat. Pemisahan antara gereja dan pemerintahan negri mesti dipahami pada tingkatan seberapa jauh kegiatan pemerintahan tidak berpengaruh langsung dan/atau tidak mencampuri kegiatan keagamaan – meskipun ini jarang terjadi di Rumahtiga.

Menurut Maspaitella, upaya untuk menjembatani relasi-relasi antara gereja dan pemerintahan negri adalah dengan mencoba menghidupkan tiga lembaga domestik: gereja, sekolah dan pemerintah. Ini dikenal dengan sebutan "tiga batu tungku". Penguatan fungsi dan relasi "tiga batu tungku" selalu dilakukan di Rumahtiga meskipun menghadapi tantangan yang cukup sulit sejak kondisi pascakonflik yang belum pulih sepenuhnya. Sebagian warga jemaat Rumahtiga masih takut untuk kembali ke tempat asal mereka dan memilih berdomisili di luar Rumahtiga.

Gambar 2

Pemuda Rumahtiga dalam Acara Pelantikan Raja Wakal

Salam-Sarane dalam Dinamika Politik Lokal

Pemerian konteks sosio-budaya ketiga negri adat Wakal, Hitumessing dan Rumahtiga dalam memperlihatkan bahwa dinamika keagamaan pada setiap negri mempengaruhi kehidupan sosial dan relasi-relasi kuasa mereka. Berbagai ekspresi empiris dan simbolis dapat dilihat melalui kegiatan-kegiatan sosial internal dan relasi-relasi sosio-budaya. Ekspresi-ekspresi keagamaan memainkan peran penting dalam membentuk karakteristik sosio-budaya yang pada gilirannya mempengaruhi karakteristik Islam dan Kristen pada tiga negri itu.

Sudut pandang sejarah dan realitas sosial kontemporer merupakan subjek-subjek wacana untuk melihat proses negosiasi identitas keagamaan sebagai manifestasi relasi-relasi kuasa. Agama bergerak menjadi struktur yang dibentuk dan struktur yang membentuk melalui relasi-relasi kuasa dalam narasi-narasi sejarah dan realitas sosial masa kini. Itu dimanifestasikan menjadi habitus yang kemudian mempengaruhi cara mengagama manusia dan hubungan antaragama dalam konteks sosial Maluku dan Indonesia. Agama memainkan peran penting sebagai modal sosial yang, pada satu sisi, mendorong transformasi sosio-budaya dan, pada sisi lain, mengawetkan distingsi-distingsi sosial dan/atau identifikasi yang potensial menciptakan segregasi sosial bahkan konflik kekerasan.

Perpaduan dialektis antara ekspresi-ekspresi kebudayaan dan agama jelas terlihat terutama dalam institusi-institusi politik di Wakal dan Hitumesing. Di Rumahtiga, ekspresi kebudayaan dan agama tampil dalam karakter yang lebih segregatif sebagai akibat pemisahan tegas injil dan adat, atau gereja dan negara. Konteks historis dan sosio-budaya yang berbeda membentuk pemahaman khas tentang diri dan komunitas, sekaligus juga membentuk pemahaman-diri yang berhubungan secara substansial dengan liyan, baik Muslim maupun Kristen.

Perpaduan dialektis yang berbeda antara *negri Salam* dan *negri Sarane* diartikulasikan melalui ritual-ritual keagamaan yang menentukan bagaimana konsep perbedaan (*otherness*) dibentuk, diserap, diakomodasi dan diharmonisasikan secara dialektis sehingga pemahaman-diri dihubungkan secara kreatif dengan liyan. Dinamika identifikasi-diri dan konstruksi habitus mempengaruhi konsep dan praktik sebagai *Salam* (Ambon-Muslim), *Sarane* (Ambon-Kristen), dan juga liyan (kelompok etnis migran) dalam perjumpaan sosial sehari-hari dan wacana politik dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Dialektika identitas Salam-Sarane itu juga tampak dalam penggunaan *bahasa tanah* atau bahasa lokal. Pada masa pertarungan ekonomi rempah-rempah abad ke-16, *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) yang sudah bercokol di Maluku menerapkan monopoli perdagangan. Monopoli ini tidak hanya dapat dilihat sebagai isu ekonomi tapi lebih sebagai strategi politik-ekonomi untuk melumpuhkan kekuatan Muslim di Leihitu. Penolakan masyarakat Leihitu berimplikasi pada keterisolasian sosial dari segala urusan kolonial, termasuk dalam pendidikan dan agama. Pada masa-masa itulah masyarakat Leihitu membangun kehidupan sosial mereka berdasarkan kearifan lokal (adat) dan agama (Islam). Penggunaan *bahasa tanah* menjadi sarana komunikasi sekaligus sebagai simbol resistensi terhadap Belanda, yang membangun sistem persekolahan dengan memperkenalkan bahasa Melayu Ambon. Dampak dari introduksi dan implementasi penggunaan bahasa Melayu Ambon ini lebih dirasakan oleh masyarakat Kristen Ambon di Leitimor (sebelah selatan Pulau Ambon).

Dalam relasi sosial-budaya antara komunitas Muslim di Leihitu dan komunitas Kristen di Leitimor, *bahasa tanah* menjadi penanda identitas yang determinan. Komunitas Muslim menghayati keislaman sebagai bagian integral dari kebudayaan lokal karena Islam menerima matra kebudayaan lokal sebagai bagian dari cara mengekspresikan identitas agama. Sebaliknya, komunitas Kristen mengalami keterbelahan identitas karena Kristianitas yang dianut menarik garis demarkasi yang tegas antara agama dan kebudayaan (adat). *Bahasa tanah* makin tergerus dan punah karena dianggap sebagai simbolisasi alam pikir pra-Kristen yang harus ditinggalkan dan dimusnahkan, untuk diganti dengan nilai-nilai etik kristiani yang terpola dalam kemasan kebudayaan Eropa (Barat).

Gambar 3

Para Tetua Adat dan Ulama dalam Acara Pelantikan Raja Wakal

Menegosiasikan Identitas dan Konfirmasi Modernitas di Leihitu

Perubahan sosial membawa suatu implikasi untuk mengontekstualisasi doktrin-doktrin dan praktik-praktik keagamaan sembari tetap merujuk pada prinsip-prinsip utama dalam Islam dan Kristianitas. Kontekstualisasi doktrin dan praktik keagamaan berlangsung dengan arah yang berbeda. Dalam komunitas Muslim, ajaran dan praktik Islam diartikulasikan melalui hibriditas dengan kebudayaan lokal atau adat, sebagaimana pernyataan "adat adalah tuan rumah, agama adalah tamu". Fleksibilitas untuk mengakomodasi agama dan kebudayaan ditentukan pula oleh struktur sosial dimana raja bertindak sekaligus sebagai pemimpin komunitas dan penasihat agama. Raja mempunyai otoritas holistik yang diatur oleh hukum adat, berasal dari *soa parenta* dan *mataruma parenta*. Ulama pada sebagian negri Muslim secara hierarkhis mempunyai posisi di bawah otoritas raja. Tidak ada pembagian kekuasaan tetapi pembagian peran karena kekuasaan dan otoritas yang terpusat pada figur raja.

Sebaliknya, komunitas-komunitas Kristen mengartikulasikan doktrin dan praktik Kristen dengan menarik garis demarkasi antara agama dan kebudayaan lokal. Ketegangan antara Kristianitas dan adat ditentukan oleh perbedaan perspektif teologis pendeta (gereja) dan raja (adat). Pendeta merepresentasikan "orang luar" (yang mempunyai penanda identitas kelompok luar) dan "modernitas" (yang berlatar pendidikan lebih tinggi – setidaknya sarjana) dalam komunitas/jemaat negri yang dilayaninya. Sebagai orang luar, pendeta tidak wajib mengikuti hukum adat setempat meskipun dia tetap menghormatinya.

Pendeta memegang otoritas gerejawi sebagai ketua majelis jemaat yang memainkan peran penting sebagai otorisator organisasi gereja dan pengelola program dan aktivitas jemaat secara sosial dan spiritual. Posisi pendeta tidak berada di bawah raja atau *saniri negri* tetapi mandiri dan setara, bahkan lebih berpengaruh daripada raja. Sementara itu, otoritas raja lebih ditentukan oleh hukum adat, *soa parenta* dan *mataruma parenta*. Jadi, komunitas Ambon-Kristen menghadapi dua institusi otoritatif yang berlawanan dalam satu komunitas/jemaat negri. Kedua institusi ini saling bersaing secara terbuka atau terselubung untuk memperoleh kekuasaan lebih atas komunitas/jemaat negri. Oleh karena itu, baik formal atau informal, kuasa dan otoritas pun harus dibagi.

Namun demikian, perubahan sosial turut menyebabkan pergeseran nalar budaya dan pembentukan identitas dalam komunitas-komunitas Ambon-Muslim dan Ambon-Kristen. Pergeseran nalar budaya tersebut mempengaruhi relasi-relasi sosial dan kekuasaan dalam negri dan antarnegri. Dalam dinamika perubahan sosial setiap komunitas berupaya keras menegosiasikan identitas mereka melalui ritual-ritual adat dan keagamaan yang melaluinya mereka menegaskan kembali ingatan-ingatan kolektif dan mitos-mitos, serta merekonstruksi perangkat makna tentang eksistensi mereka berkaitan dengan liyan dan mereproduksi narasi-narasi kebudayaan kontekstual.

Tentu saja, terdapat berbagai konflik kepentingan dalam proses menegosiasikan identitas yang pada gilirannya bermuara pada kontestasi politik identitas dengan menggunakan otoritas politik dan budaya. Fenomena ini akan melanggengkan relasi-relasi patron-klien yang sebenarnya sudah ada dalam tatanan kebudayaan lokal, namun kini mendapat makna baru sejalan dengan kepentingan-kepentingan politik. Dengan demikian, relasi-relasi kuasa antaraktor dan antarkomunitas menjadi makin kompleks (*semantic accretion*).

Negosiasi identitas lokal dan identitas nasional, penyerapan ideologi kebangsaan Pancasila dalam matra kebudayaan lokal dan ketegangan-ketegangan politik yang disiasati melalui strategi hibriditas politik pada tingkat lokal memperlihatkan keterjalinan jejaring makna dalam proses sejarah, sosio-politik dan transformasi budaya komunitas-komunitas lokal melalui perjumpaan dan ketegangan dengan entitas-entitas lain. Makna keberbedaan (*otherness*) dibentuk dalam perjumpaan yang inklusif dan interaktif yang memosisikan individu/kelompok dalam suatu situasi dimana identitas mereka dapat dipahami terutama sebagai identitas-identitas yang saling bersinggungan dan beririsan. Identitas-identitas yang saling bersinggungan dan beririsan adalah identitas-identitas yang bergerak, dinamis, jamak dan hibrid, yang dideterminasi oleh relasi-relasi kuasa yang mengarahkan pola-pola kebudayaan masyarakat melalui cara-cara relasional dengan liyan.

Itulah sebabnya mengapa interpretasi tentang "siapa aku atau kami" dan "siapa dia atau mereka" menjadi suatu proses yang kompleks dan rumit karena melibatkan berbagai matra makna dan interpretasi yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan relasi-relasi dalam ranah sosial dan arena politik tertentu. Identitas keagamaan adalah salah satu variabel penting dalam ranah sosial dan arena politik orang Maluku. Namun demikian, identitas keagamaan dapat berdiri mandiri karena agama itu sendiri adalah "struktur yang dibentuk dan struktur yang membentuk" sehingga mempunyai banyak lapisan makna dan interpretasi.

Konteks Ambon/Maluku sebagai bagian dari proses "menjadi Indonesia" dengan seluruh dinamika historis dan transformasi sosial hingga kini, memperlihatkan bahwa negosiasi identitas (agama dan etnisitas) berlangsung dalam konteks jejaring institusional dan dimensional. Logika tersebut membawa kepada suatu kesadaran kritis untuk menghindari jebakan-jebakan budaya yang mengonstruksi makna identitas dengan nalar esensial yang hanya memperkuat stigmatisasi dan stererotip terhadap keberbedaan.

Gambar 4

Bersama Raja Hitumessing Abdullah Pelu dan Pendeta Elifas Maspaitella (Rumahtiga)

Simpulan

Penelitian yang dilakukan pada tiga komunitas Muslim-Kristen di Pulau Ambon ini memperlihatkan suatu proses negosiasi identitas agama dan budaya yang diperlukan sebagai suatu strategi kebudayaan menghadapi arus globalisasi yang telah mentransformasi struktur-struktur kebudayaan lokal dan agama orang Ambon. Komunitas Wakal, Hitumesing dan Rumahtiga meyakini bahwa mereka mempunyai hubungan mitologis sebagai saudara kandung (gandong). Namun, keyakinan mitologis tersebut hanya diketahui oleh segelintir orang generasi tua.

Setelah tensi konflik sosial di Ambon mereda, narasi-narasi gandong ketiga komunitas ini mulai gencar disosialisasikan kepada generasi muda ketiga negri tersebut. Bahkan ketiganya menyepakati untuk meritualkan hubungan gandong ketiganya dengan upacara "panas gandong", sesuatu yang belum pernah dilakukan sejauh ini. Ritualisasi "panas gandong" Wakal-Hitumesing-Rumahtiga ini dilakukan sebagai instrumen budaya yang penting untuk merevitalisasi matra kebudayaan lokal berhadapan dengan tren globalisasi yang mereduksi makna korelasional antara kebudayaan lokal dan agama dalam konteks kekerabatan lintas agama di Ambon. Mereka mereproduksi dan mereinterpretasi narasi gandong untuk melegitimasi ikatan-ikatan kebudayaan lintas agama yang telah menjadi karakter sosial orang Ambon.

Penelitian juga memperlihatkan sisi lain dari implikasi kekuasaan politik desentralisasi dan revitalisasi tradisi lokal Ambon. Narasi-narasi adat tersebut mempengaruhi relasi-relasi kuasa dan dinamika sosial-budaya pada tingkat lokal (dalam konteks negri maupun antarnegri) dan reinterpretasi ajaran keagamaan dalam konteks perubahan sosial dan kebudayaan lokal. Bentuk-bentuk negosiasi berlangsung secara subtil, terutama melalui diskursus sintetis "nasional-lokal" untuk menginterpretasi kebijakan nasional negara sekaligus melalui dialektika demokratis kepentingan-kepentingan pusat dan pinggiran. Hibridisasi tradisi dan demokrasi patronase sebenarnya menjadi upaya untuk mempertahankan

keseimbangan sosial dalam konteks masyarakat Ambon. Karakter sosiologis masyarakat Ambon telah meneguhkannya sebagai masyarakat multikultur sejak dulu, yang turut membentuk habitus sosial dan relasi-relasi keagamaan hingga saat ini.

Gambar 5

Bersama Raja Hitu Lama – Sahlan Pelu

Daftar Pustaka

Abdurrachman, Paramitha R. et al (eds.), 1973, *Bunga Rampai Sejarah Maluku*. Jakarta: LPSM.

Abdurrahman (ed.), 2012, *Sejarah Sosial Kerajaan Hitu Ambon*. Jakarta: Balitbang Kementerian Agama Republik Indonesia.

Amirrachman, Alpha, 2012, *Peace Education in the Moluccas, Indonesia Between Global Models and Local Interests*, PhD dissertation, Universiteit van Amsterdam.

Andaya, Leonard Y., 1993, *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*. Honolulu: University of Hawaii.

Anderson, Benedict, 2006, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, revised edition. New York: Verso.

Aritonang, Jan Sihar and Steenbrink, Karel (eds.), 2008, *A History of Christianity in Indonesia*. Leiden: Brill.

Aspinall, Edward and Mietzner, Marcus (eds.), 2010, *Problems of Democratization in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS.

Azca, M. Najib, 2011, *After Jihad: A Bibliographical Approach to Passionate Politics in Indonesia*, PhD dissertation, Universiteit van Amsterdam.

Batmomolin, Lukas, 2000, *Religious Conflict in Ambon, Indonesia: Reconciliation through the Pela-Gandong System*, MA thesis, The American University, Washington D.C.

Bartels, Dieter, 1977, *Guarding the Invisible Mountain: intervillage alliances, religious syncretism and ethnic identity among Ambonese Christians and Moslems in the Moluccas*, PhD dissertation, Cornell University.

Brauchler, Birgit, 2003, *Der Molukkenkonflikt Online: Religion, Identitat, und Imagined Communities im Internet*, PhD dissertation, University of Munich.

Bell, Catherine, 2009, *Ritual: Perspectives and Dimensions*. Oxford: Oxford University Press.

Berger, Peter L. and Luckmann, Thomas, 1973, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Victoria: Penguin Books.

Bhabha, Homi K., 2008, *The Location of Culture*. New York: Routledge.

Bourdieu, Pierre, 1977, *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

_____, 1991, *Language and Symbolic Power*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Brauchler, Birgit, 2015, *The Cultural Dimension of Peace: Decentralization and Reconciliation in Indonesia*. New York: Palgrave Macmillan.

Burke, Peter J. and Stets, Jan E., 2009, *Identity Theory*. Oxford: Oxford University Press.

Chauvel, Richard, 1990, *Nationalists, Soldiers and Separatists: the Ambonese Islands from Colonialism to Revolt 1880-1950*. Leiden: KITLV Press.

Cooley, Frank L., 1961, *Altar and Throne in Central Moluccan Societies: a study of the relationship between the institutions of religion and the institution of local government in a traditional society undergoing rapid social change*, PhD dissertation, Yale University.

Davidson, Jamie S. and Henley, David, 2007, *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism*. London & New York: Routledge.

De Certeau, Michel, 1984, *The Practice of Everyday Life*. Berkeley, CA: University of California Press.

Denzin, Norman K. and Lincoln, Yvonna S. (eds.), 1994, *Handbook of Qualitative Research*. London: SAGE Publication.

Friedman, Jonathan, 2000, *Cultural Identity and Global Process*. London: SAGE Publications.

Geertz, Clifford, 1973, *The Interpretation of Culture*. New York: Basic Books.

Gottowik, Volker (ed.), 2014, *Dynamics of Religion in Southeast Asia: magic and modernity*. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Gutmann, Amy (ed.), 1994, *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. New Jersey: Princeton University Press.

Heryanto, Ariel, 2006, *State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging*. New York: Routledge.

Held, David, 2006, *Models of Democracy*, third edition. Cambridge: Polity Press.

Hiariej, Eric, 2012, *Globalisasi, Kapitalisme dan Perlawanan*. Yogyakarta: Fisipol UGM.

Jenkins, Richard, 2004, *Social Identity*. New York: Routledge.

Kurtz, Donald V., 2001, *Political Anthropology: Paradigms and Power*. Boulder: Westview Press.

Laksono, Paschalis Maria, 1990, *Wuut Ainmehe Nifun, Manut Ainmehe Tilor (Eggs from one fish and one bird): A study of the maintenance of social boundaries in the Kei Islands*, PhD dissertation, Cornell University.

Manusama, Z.J., 2004, *Historie en Sociale Structuur van Hitu: tot het midden der zeventiende eeuw*. Utrecht: Moluks Historisch Museum.

Mearns, David and Healey, Chris (eds.), 1996, *Remaking Maluku: Social Transformation in Eastern Indonesia*, Special Monograph No. 1, Centre for Southeast Asian Studies, Northern Territory University.

Meijer, Roel (ed.), 2009, *Global Salafism: Islam's New Religious Movement*. London: Hurst.

Nordholt, Henk Schulte and Van Klinken, Gerry (eds.), 2007, *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Soeharto Indonesia*. Leiden: KITLV.

Pannell, Sandra (ed.), 2003, *A State of Emergency: Violence, Society and the State in Eastern Indonesia*. Casuarina: NTU Press.

Pariela, Tonny D., 2008, *Damai di Tengah Konflik Maluku: Preserved Social Capital sebagai Basis Survival Strategy*, PhD dissertation, Universitas Kristen Satya Wacana.

Reid, Anthony, 1993, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680*: *Expansion and Crisis*, Volume II. New Haven: Yale University Press.

Reuter, Thomas and Horstmann, Alexander, 2013, *Faith in the Future: Understanding the Revitalization of Religions and Cultural Traditions in Asia*. Leiden: Brill.

Rey, Terry, 2007, *Bourdieu on Religion: Imposing Faith and Legitimacy*. London & New York: Routledge.

Ricklefs, Merle C., 2001, *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*, Third Edition. Stanford: Stanford University Press.

Schröter, Susanne (ed.), 2010, *Christianity in Indonesia: Perspectives of Power*. Berlin: Lit Verlag.

Smith, Linda T., 2006, *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*. Dunedin: University of Ontago Press.

Subagya, Y. Tri, 2015, *Support for Ethno-religious Violence in Indonesia*, PhD dissertation, Radboud Universiteit.

Sumanto, 2013, *Interreligious Violence, Civic Peace, and Citizenship: Christians and Muslims in Maluku, Eastern Indonesia*, PhD dissertation, Boston University.

Suyatno, J. Sophia, 1986, *Pergeseran Tipe Kepemimpinan Raja di Desa Rumahtiga: Suatu Studi tentang Kasus Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa*, MA thesis, Universitas Indonesia.

Tarling, Nicholas and Gomez, Edmund T. (eds.), 2008, *The State, Development and Identity in Multi-Ethnic Societies: Ethnicity, Equity and the Nation*. London & New York: Routledge.

Taylor, Charles, 2007, *Modern Social Imaginaries*. Durham: Duke University Press.

Tilly, Charles, 2005, *Identities, Boundaries and Social Ties*. Boulder: Paradigm Publishers.

Törnquist, Olle et all (eds.), 2009, *Rethinking Popular Representation*. New York: Palgrave Macmillan.

Topatimasang, Roem (ed.), 2004, *Orang-orang Kalah: Kisah Penyingkiran Masyarakat Adat Kepulauan Maluku.* Yogyakarta: Insist Press.

Turner, Bryan S., 2011, *Religion and Modern Society: Citizenship, Secularization and the State*. Cambridge: Cambridge University Press.

Turner, Kathleen T., 2006, *Competing Myths of Nationalist Identity: Ideological Perceptions of Conflict in Ambon, Indonesia*, PhD dissertation, Murdoch University.

Van Klinken, Gerry, 2007, *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*. London & New York: Routledge.

Vansina, Jan, 1969, *Oral Tradition: Study in Historical Methodology*. London: Routledge & Kegan Paul.

Von Benda-Beckmann, Franz and Von Benda-Beckmann, Keebet, 2007, *Social Security Between Past and Future: Ambonese Networks of Care and Support*. Berlin: Lit Verlag.